

>> kilas <<

Apkasi Salurkan Bantuan bagi Korban Bencana

KUNINGAN – Rentetan musibah yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air, mengundang kepedulian berbagai lapisan masyarakat. Kepedulian itu seperti yang ditunjukkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Dalam menunjukkan kepeduliannya, Apkasi menyerahkan bantuan kepada daerah-daerah yang tertimpa bencana alam. Adapun bantuan tersebut berupa uang dengan total nilai Rp 600 juta. Selanjutnya, bantuan itu akan disalurkan kepada

enam daerah yang tertimpa bencana, dengan besaran Rp 100 juta per daerah. Keenam daerah tersebut, yakni Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Kepulauan Mentawai Sumatra Barat, Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang.

“Walaupun tidak memadai, namun kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban para korban,” ujar Sekretaris Umum Apkasi, Aang Hamid Suganda. Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Kuningan itu mengungkapkan, bantuan akan diserahkan oleh koordinator wilayah Apkasi setempat. Dengan demikian, bantuan dapat tersalurkan secara langsung kepada para korban yang tertimpa bencana.

■ liliis, ed: agus

Warga Keluhkan Lemahnya Penanganan Banjir

CIMAHI – Sejumlah warga Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, mengeluhkan lemahnya penanganan banjir dari pemerintah. Menurut mereka pemerintah terkesan tidak serius mengatasi masalah banjir yang terjadi di Cimahi.

Bahkan, akhir-akhir ini warga diresahkan dengan datangnya banjir. Sebab, adanya banjir di Cimahi tergolong sulit diprediksi. Diduga banjir tersebut disebabkan penyempitan saluran dan pendangkalan drainase. “Terus terang, kami takut dengan banjir

yang terus mengancam,” kata Abdul Aziz, salah seorang warga Citeureup RT 1/7, saat ditemui di kediamannya, Ahad (14/11).

Dia menganggap bahwa Pemkot Cimahi tidak serius menangani masalah banjir. Sebab, belum pernah ada tindakan konkret dari pemkot. Padahal, peristiwa banjir di Cimahi tidak hanya terjadi saat turun hujan saja, meskipun tidak ada hujan, terkadang banjir tetap mengancam.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Ison Suhud mengatakan, pembangunan saluran air (drainase) di Cimahi sebenarnya sudah mencapai daya tampung maksimal. Setidaknya telah memenuhi beberapa kawasan yang ditentukan. ■ e2b, ed: agus

Cuaca Buruk, Nelayan Sulit Melaut

Lilis Sri Handayani

INDRAMAYU -- Gelombang tinggi dan cuaca buruk di tengah laut kerap terjadi dan sulit diprediksi. Akibatnya, para nelayan tradisional di Kabupaten Indramayu tidak bisa melaut. Pendapatan mereka pun menurun drastis akibat masa paceklik tersebut.

Adapun para nelayan tradisional yang tidak melaut itu tersebar di sejumlah muara pantai, seperti Karangsong dan Singaraja di Kecamatan Indramayu, Limbangan dan Dadap di Kecamatan Juntinyuat, dan Majakerata di Kecamatan Balongan.

“Bahaya kalau dipaksakan melaut,” ujar salah seorang nelayan tradisional di Desa Dadap, Siwan, Ahad (14/11). Menurut dia, gelombang tinggi dan cuaca buruk di tengah laut sangat sulit diprediksi.

Kata Siwan, cuaca yang cerah di daratan, bisa berubah secara tiba-tiba menjadi buruk saat nelayan sampai di tengah laut. Bahkan, ketinggian gelombang bisa mencapai kurang lebih tiga meter.

Karena itu, nelayan harus sesegera mungkin meninggalkan laut dan kembali ke darat. Akibatnya, hasil tangkapan di laut sangat sedikit bahkan tidak dapat sama sekali.

Siwan menjelaskan, selama ini, biasa melaut untuk mencari ikan teri nasi. Dalam kondisi normal, hasil tangkapannya bisa mencapai 20 kg per hari. Setelah dipotong dengan biaya sewa perahu senilai Rp 15 ribu, penghasilan bersih yang dibawanya pulang bisa mencapai Rp 50 ribu.

Namun akibat cuaca buruk, Siwan mengaku, hanya bisa mendapatkan tangkapan ikan teri sebanyak dua kilogram per hari. Karenanya, uang yang bisa dibawanya pulang hanya sekitar Rp 10 ribu per hari. “Kadang tidak dapat uang sepeser pun kalau cuaca benar-benar buruk,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan nelayan asal Desa Singaraja, Raskadi. Dia mengatakan, selama ini, biasa mencari rajungan di laut. Dalam kondisi normal, tangkapannya bisa mencapai 50 kg untuk sekali berangkat melaut selama tiga hari. Namun kini, tidak bisa mendapatkan hasil tangkapan sedikitpun. Pasalnya, sejak kondisi cuaca di laut memburuk, dia memutuskan untuk tidak melaut terlebih dulu.

Untuk menghidupi keluarga, Raskadi hanya bisa mengandalkan utang kepada pemilik warung sayur. Utang tersebut, akan dibayar jika dia sudah kembali melaut. Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT), Kajidin, membenarkan kesulitan yang dialami para nelayan tradisional saat ini. Dia menjelaskan, kondisi cuaca di laut memang sulit diprediksi.

Menurut Kajidin, para nelayan sebenarnya memiliki pengalaman untuk membaca kondisi cuaca di tengah laut. Dengan demikian, nelayan bisa menyesuaikan jadwal keberangkatan melaut dengan kondisi cuaca. Namun saat ini, lanjut dia, cuaca benar-benar sulit diprediksi. ■ ed: agus



RICUH

Suasana diskusi publik membahas proyek pembangunan PLTSa, di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Ahad (14/11), mendadak ricuh. Kondisi ini terjadi akibat protes sejumlah peserta yang pro PLTSa, kecewa dengan tidak adanya wakil pembicara dari mereka. Hingga kini, proyek tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Diskusi PLTSa Ricuh

Pengolahan sampah Kota Bandung, hendaknya berbasis pemikiran lingkungan.

BANDUNG -- Diskusi publik tentang pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), Ahad (14/11), di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, berakhir ricuh. Sejumlah pembicara dalam diskusi itu pun bahkan diamankan aparat kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Acara yang dijadwalkan selesai pukul 14.00 WIB pun terpaksa dihentikan pada pukul 12.45 WIB, sebelum menghasilkan apa-apa. Kericuhan ini terjadi karena beberapa warga yang datang mempro-

tes panitia yang hanya menghadirkan pembicara dari pihak kontra PLTSa saja. Sedangkan pihak pro tidak menjadi pembicara.

Hadir sebagai pembicara di antaranya Kepala Bapeda Kota Bandung, Taufik Rachman, Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTs), Mubyar Purwasmita, dosen Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan, Gede H Cahyana, serta koordinator Aliansi Rakyat Tolak Pemaksaan Pabrik Sampah di Pemukiman, Roni Tabroni.

Ajang Tajuddin (38 tahun), warga Kelurahan Rancanumpang mengatakan, seharusnya diskusi ini bisa netral dan menghormati semua pihak. “Nyatanya, panitia hanya mengundang pihak yang kontra saja, kami kecewa,” ucap dia.

Dimintai tanggapannya, M Bijaksana Juneroseno, dari

Forum Hijau Bandung, sebagai salah satu penyelenggara diskusi mengatakan, tujuan diskusi ini sebenarnya menjadi jembatan agar terbangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pengolahan sampah. “Namun ternyata, animo masyarakat tidak bisa dibendung, sehingga diskusi pun gagal dilaksanakan,” katanya menegaskan.

Pembangunan proyek PLTSa ini, sebenarnya bukanlah permasalahan baru di Kota Bandung. Adanya pro-kontra di tengah warga yang meminta kepada pemerintah untuk menghentikan proyek ini, menjadi salah satu permasalahan.

Menurut Roni, pembangunan PLTSa ini, jelas akan mengganggu kesehatan karena lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman warga. Selain itu, rencana pembangunan Stadion Utama Sepak

bola (SUS) di kawasan primer Gedebage, Bandung, tidak selaras dengan pembangunan PLTSa tersebut.

Selain itu, ucap dia, pembangunan proyek PLTSa ini juga dirasa sarat akan dimensi politik. Hal ini terjadi ketika wali kota sudah akan melakukan peletakan batu pertama pada proyek tersebut, padahal kasus hukum gugatan PLTSa ini, belum juga selesai. Bahkan, referendum Kota Bandung atas 29 kecamatan yang diklaim wali kota pun, menurut Roni, tidak memiliki kekuatan hukum. “Karena warga yang tinggal di sanalah yang sebenarnya berhak dimintai suaranya,” tegasnya.

Pernyataan Roni dikuatkan oleh Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTs), Mubyar Purwasmita. Dia mengatakan,

bahwa asap hasil pembakaran oleh insenerator bisa membahayakan warga Kota Bandung yang kondisi geografisnya berbentuk cekungan. “Asap hasil pembakaran sampah itu, akan berputar-putar saja di cekungan Bandung. Dan ini jelas mencemari udara sekitar,” tegasnya.

Mubyar mengatakan, hendaknya pengolahan sampah kota Bandung berbasis pemikiran lingkungan, jangan menganggap teknologi canggih dan berproses secara cepat sudah pasti baik dampaknya. Solusi alternatif yang Mubyar sampaikan adalah gerakan *reuse, reduce, dan recycle* (3R).

“Gerakan ini belum bisa dikatakan gagal, karena selama ini, hanya sebagian orang yang melakukan gerakan ini,” kata Mubyar. Menurutnya peran pemerintah diperlukan agar pengelolaannya lebih massif. ■ mj18, ed: agus

Heryawan Terima Ksatria Bakti Husada Kartika



Oleh: **Maman Sudiaman**

Penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika, diraih Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan. Ia pun mengaku berbahagia mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat ini. Melalui penghargaan yang diterimanya itu, gubernur berharap, dapat lebih memacu kemajuan pelayanan bidang kesehatan di Jabar.

Apalagi, apresiasi tersebut merupakan wujud pengakuan sekaligus prestasi Pemprov Jabar dalam memajukan bidang kesehatan. “Sebuah prestasi yang harus terus dipertahankan bahkan didorong lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat luas,” tegasnya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika kepada gubernur Jabar.

Pasalnya, Pemprov Jabar dinilai berjasa luar biasa dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, berba-

gai program terobosan dan kegiatan inovatif dibidang kesehatan, menjadi penilaian penting dalam pemberian penghargaan tersebut.

Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, menyerahkan penghargaan itu kepada Gubernur Heryawan di Auditorium Gedung Baru Kementerian Kesehatan Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (12/11) pekan lalu.

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menkes RI No: 1616/Menkes/SK/XI/2010 tertanggal 12 November 2010. Penyerahan itu dilaksanakan pada Malam Penganugerahan Penghargaan Bidang Kesehatan 2010.

Menurut Menkes, banyak program yang sudah digulirkan Pemprov Jabar, dalam rangka memajukan kualitas kesehatan masyarakat. “Sehingga wajar bila Pemprov Jabar dinilai berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan,” ujarnya. Selain itu, inovasi dalam kebijakan dan program kesehatan itu di antaranya Pemprov Jabar akan membangun 200

puskesmas PONED/rawat inap, KTP berasuransi dan menyekolahkan 1.000 bidan desa.

Bahkan, lanjut Menkes, dari sisi alokasi anggaran, Pemprov Jabar dinilai sangat berpihak pada bidang kesehatan. Hal itu, kata dia, terdapat dari peningkatan alokasi anggaran kesehatan yang signifikan. Pada tahun 2010, alokasi anggaran sebesar lima persen dari APBD Jabar dan tahun 2011 meningkat menjadi 7,5 persen. “Diharapkan tahun 2012 anggarannya digenjut menjadi 10 persen,” katanya.

Usai menerima penghargaan, Heryawan menyampaikan, ucapan terima kasih atas penghargaan bidang kesehatan yang diberikan pemerintah. “Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan atas keberhasilan Pemprov Jabar terhadap bidang kesehatan,” katanya. Dengan diraihnya penghargaan ini, tambahnya, diharapkan dapat lebih memacu kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Jabar.

■ ed: agus